

---

**Peran Komando Kewilayahan dalam Membantu Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan (Studi Kampung Moibaken dan Kampung Suneri di Kabupaten Biak Numfor)**

*Zulkifli*

**Kodam XVII/Cenderawasih**

Email: [zulkifli.chairena@mail.ugm.ac.id](mailto:zulkifli.chairena@mail.ugm.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research was conducted in Biak Numfor Regency with the title “The role of regional command in assisting local governments and its implications for food resilience” with the focus on Moibaken and Suneri Villages, Biak Numfor Regency. This research aims to describe and analyze the implementation of the role of the Regional Command in assisting local governments and its implications for food Resilience in Moibaken Village and Suneri Village, Biak Numfor Regency.*

*The method used in this research is a type of descriptive research with a qualitative approach. Techniques of data collection are carried out through observation, in-depth interviews, documentation, and library studies covering the role of regional commandos aimed at assisting local governments.*

*The results of this study indicate that the implementation of the role of the Regional Command in assisting local governments and its implications for food Resilience has not run optimally. to farmers. as a regulator, a regulation is needed that regulates food Resilience. Then as a dynamist in its role it needs to be optimized by efforts to mobilize all existing units or form a post on food Resilience which is not just a guide as has been so far; so that with experience and togetherness the soldiers can take quick steps and actions to achieve food self-sufficiency. The strategies carried out by the Government and the Regional Command in Biak Numfor Regency in improving food Resilience are 1) socialization, this seems not yet optimal. 2) supervision and control, showing that the role of the Regional Command in supervision is good, but in controlling it is not optimal. 3) Education. shows that his role as an educator has not gone well because it is due to a lack of coordination with the government and farmers, 4) coordination, this shows that it is not optimal, this is due to a lack of communication made to farmers to increase awareness of the importance of food Resilience by paying attention to aspects of production agriculture, human resources, and agricultural innovation.*

**Keywords:** *Role, Regional Command, Food Resilience*

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Peran komando wilayah dalam membantu pemerintah daerah dan implikasinya terhadap ketahanan pangan” dengan fokus di Kampung Moibaken dan Suneri Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi peran Komando Kewilayahan dalam membantu pemerintah daerah dan implikasinya terhadap ketahanan pangan di Kampung Moibaken dan Kampung Suneri Kabupaten Biak Numfor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi (*observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi (*documentation*), dan studi pustaka yang meliputi peran komando kewilayaan yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Komando Kewilayahan dalam membantu pemerintah daerah dan implikasinya terhadap ketahanan pangan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat pada keterlibatan Komando

Kewilayahan di Kabupaten Biak Numfor sebagai fasilitator secara langsung dalam ketahanan pangan itu masih perlu untuk dikaji ulang terkait mekanisme dalam melakukan pendampingan kepada petani. Sebagai regulator, diperlukan regulasi yang mengatur tentang ketahanan pangan. Kemudian sebagai dinamisator dalam perannya perlu dioptimalkan dengan upaya mengarahkan seluruh satuan yang ada atau membentuk posko tentang ketahanan pangan yang tidak hanya sekedar menjadi pengarah seperti yang berlaku selama ini, sehingga dengan pengalaman dan kebersamaan prajuritnya dapat melakukan langkah dan tindakan yang cepat guna mencapai swasembada pangan. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komando Kewilayahan di Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan ketahanan pangan yaitu 1) sosialisasi, hal tersebut terlihat belum optimal. 2) pengawasan dan pengendalian, menunjukkan bahwa peran Komando Kewilayahan dalam pengawasan baik, namun dalam pengendalian belum optimal. 3) Edukasi, menunjukkan bahwa perannya sebagai edukator belum berjalan dengan baik karena disebabkan kurangnya koordinasi yang terjadi dengan pemerintah dan petani, 4) koordinasi, hal ini menunjukkan bahwa kurang optimal, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi yang dilakukan kepada petani untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ketahanan pangan dengan memperhatikan aspek produksi pertanian, sumber daya manusia, serta inovasi pertanian.

**Kata Kunci :** *Peran, Komando Kewilayahan, Ketahanan Pangan*

## **PENGANTAR**

Ketahanan pangan telah menjadi kebijakan dan program prioritas strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, kebijakan dan program ketahanan pangan juga menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di Provinsi Papua. Hal ini merupakan kebijakan strategis sebagai respon atas permasalahan kurang gizi dan ketahanan pangan di Provinsi Papua. Secara formal, kebijakan dan program ketahanan pangan juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua. Untuk mendukung pemerintah Provinsi Papua dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi Papua (*Food Resilience and Atlas* atau FSVA Papua) telah mengidentifikasi daerah-daerah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Peta ini merupakan informasi strategis dan alat yang sangat baik untuk memastikan bahwa kebijakan sumber daya yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang maksimal. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Menurut Baliwati (2004) secara umum, ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu kecukupan (*sufficiency*), akses (*access*), keterjaminan (*Resilience*) dan waktu (*time*). Dimana aspek tersebut ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem, yang merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability dan stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*) dan pemanfaatan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil kerja dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan. Ketersediaan pangan menyangkut masalah produksi, stok, impor dan ekspor, yang harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan sebagian bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, pangan yang tersedia bagi keluarga harus cukup

volume dan jenisnya, serta stabil dari waktu ke waktu

Ari Ganjar Herdiansah (2017) yang berjudul *Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Pembantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Peran TNI AD membantu pemerintah dalam ketahanan pangan sudah sesuai dengan Delapan Wajib TNI, yang salah satunya poinnya adalah TNI menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Ada MoU dengan pemerintah atau masa MoU sudah selesai, TNI tetap wajib membantu mengatasi kesulitan petani, seperti masalah irigasi, hama, kekeringan dan masalah lainnya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui Koramil dan Babinsa, terus membina petani dari mulai pembukaan lahan, penggarapan lahan, penyemaian, penanaman, pemupukan, panen dan yang terakhir pasca panen agar menjual hasil panen padinya ke Bulog, sehingga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kepada petani.

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan bahan makanan (NBM) Kabupaten Biak Numfor memberi gambaran bahwa ketersediaan energi dari berbagai kelompok bahan makanan sebesar 1.714,55 kkal/hr/kapita, protein 68,13 gr/hr/kapita dan lemak 51,61 gr/hr/kapita. Dari data tersebut untuk ketersediaan energi masih di bawah standar nasional (standar nasional 2.500 k.kal/hr/kapita), sedangkan ketersediaan protein sudah melampaui standar nasional (standar nasional 57 gr/kapita/hari). (*Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021*).

Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor yang ada belum maksimal. Secara khusus

dalam penelitian ini peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor terkait dengan ketahanan pangan dan implikasinya serta bagaimana peran TNI dalam hal ini Kodim sebagai pelaksana di lapangan yakni Babinsa, karena TNI AD sangat berkepentingan untuk menciptakan ketahanan nasional di bidang pangan. berdasarkan pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang terkait dengan pangan dapat menjadi pemicu bagi krisis yang berujung pada kehancuran sebuah negara dan daerah sehingga dapat menimbulkan konflik, bisa dibayangkan apabila tergantung dari negara lain dan suatu saat bermasalah dan diembargo pasti akan sulit sekali mengatasi, rakyat kelaparan, unjuk rasa dimana-mana maka akan menimbulkan kekacauan yang sangat besar yang dapat mengganggu keamanan negara.

Dari latar belakang permasalahan di atas menjadi dasar dan alasan yang kuat bagi peneliti untuk membuat rumusan masalah mengenai peran Komando Kewilayahan dalam membantu Pemerintah Daerah terkait ketahanan pangan dan strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi peran Komando Kewilayahan dalam membantu Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang peran pemerintah daerah dengan TNI AD yang dalam hal ini satuan Komando Kewilayahan (Kodim dan Koramil) dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, sehingga didapatkan satu pola kerjasama dalam penanganan ketahanan pangan di suatu wilayah khususnya Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini merupakan hasil peneliti dari beberapa hasil penelitian yang pernah ada tentang peran Komando Kewilayahan.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada peran Komando Kewilayahan dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor dengan mendorong petani dan pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi mencapai ketahanan pangan dan fungsi yang relevan sebagai regulator, fasilitator, dinamisator dapat dijadikan ukuran untuk melakukan strategi dalam pelaksanaannya dilapangan.

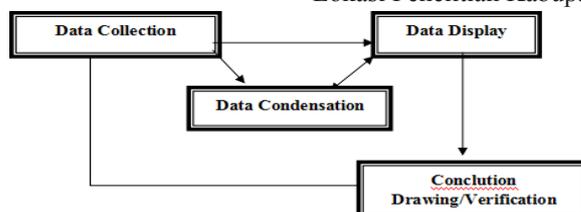
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:205), metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan untuk menganalisis dan meneliti secara mendalam fenomena mengenai implementasi peran Komando Kewilayahan dalam membantu Pemerintah Daerah dan implikasinya terhadap ketahanan

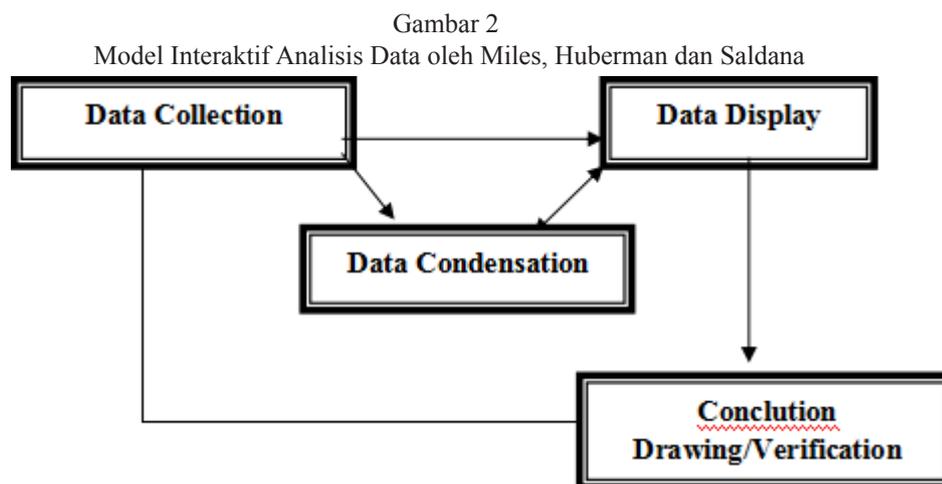
pangan di Kabupaten Biak Numfor yang merupakan objek alamiah.

Lokasi penelitian yang dijadikan untuk penelitian ini Kampung Moibaken dan Kampung Suneri Distrik Yendidori di Kabupaten Biak Numfor yang merupakan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan produksi ketahanan pangan dimana kondisi tanah Kampung Moibaken dan Kampung Suneri sangat baik untuk menanam jenis tanaman pangan Palawija dan Posisi Kabupaten Biak Numfor berada di gugusan pulau yang berseberangan langsung dengan Samudera Pasifik. Posisi ini menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu tempat yang strategis dan penting untuk berhubungan dengan dunia luar terutama negara-negara di kawasan Pasifik, Australia atau Filipina. Letak geografis ini memberikan kenyataan bahwa posisinya sangat strategis untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam, membangun kawasan industri, termasuk industri pariwisata.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan

Gambar 1  
Lokasi Penelitian Kabupaten Biak Numfor





Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33)

tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Adapun orang-orang yang dianggap mengetahui terkait penelitian yang akan dilaksanakan atau orang yang dianggap mengetahui semua tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi maupun tentang data-data/dokumen yang diperlukan. Guna memperoleh keterangan dan fakta-fakta selengkap mungkin dari keadaan empirik dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu; 1. studi pustaka, 2. observasi, 3. wawancara, dan 4. dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan menggunakan analisis data model (Miles, 2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Collection, Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

## PEMBAHASAN

Perkembangan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias menerima keberadaan TNI dalam menjaga serta memberikan semangat dalam melanjutkan hidup serta

kesejahteraannya. Berdasarkan kondisi itu membuktikan bahwa TNI sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat terutama dalam bidang pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Sasaran yang akan dilakukan oleh Komando kewilayahan Kabupaten Biak Numfor adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketahanan pangan yang ada di wilayah, meningkatkan kemampuan Babinsa dalam pengetahuan bidang pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah, meningkatkan kemampuan Babinsa dalam melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan bidang pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan; dan meningkatkan kemandirian TNI dengan rakyat guna mendukung tugas pokok TNI AD. Adapun tujuannya adalah membantu program pemerintah untuk meningkatkan pencapaian hak atas pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia meningkatkan ketahanan pangan nasional dan local, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kemandirian TNI dengan rakyat serta meningkatkan perekonomian

agar tersedianya logistik wilayah sesuai dengan kearifan lokal untuk kepentingan pertahanan Negara. berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini dengan peran Komando Kewilayahan dan implikasinya terhadap pangan di Kabupaten Biak Numfor maka penulis dapat menggambarkan indikator-indikator berdasarkan rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

### **Peran Komando Kewilayahan Sebagai Regulator dalam Membantu Pemerintah Daerah**

Secara garis besarnya pangan merupakan kebutuhan dasar pada praktiknya pemenuhan kebutuhan pangan diserahkan kepada masyarakat peran pemerintah lebih banyak kepada regulator sehingga tidak ada monopoli oleh pemerintahan dalam situasi demikian, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan menghindari rawan pangan yang terjadi di setiap daerah berdasarkan Penetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah antar susunan pemerintah. Konsekuensi logisnya, daerah akan mempunyai prioritas urusan pemerintahan sesuai karakter daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk itu jika lihat di Kabupaten Biak Numfor potensi pertanian sangat baik dan mempunyai nilai lebih terhadap Kabupaten lain di bidang pertanian, sehingga hal tersebut sangat dibutuhkan sebuah regulasi yang mempunyai nilai lebih dan menguntungkan untuk petani dan stakeholder yang terkait dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Keterlibatan TNI dalam hal ini Komando Kewilayahan memang bukan ranahnya dalam bidang pertanian namun hal tersebut dibutuhkan karena untuk meningkatkan swasembada pangan

sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maka hal tersebut perlu TNI untuk lebih menonjol dalam mengimplementasikan hal tersebut dalam membantu pemerintah serta masyarakat.

Dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan maka sangat diperlukan sebuah regulator yang mengatur hal tersebut agar pengelolaan dan pemberdayaan ketahanan pangan kepada seluruh masyarakat dan petani mendapat jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan sebagai petani. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor masih dalam tahapan penyusunan, sementara untuk perannya sebagai regulator masih terikat dengan peraturan pusat terkait dengan swasembada pangan dan ketahanan pangan.

Oleh sebab itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat bersifat kompleks, untuk itu pilihan kebijakan yang mendukung dan lingkungan kelembagaan yang diperlukan mau tidak mau harus dilaksanakan melalui komitmen politik pangan yang kuat. Dukungan dan komitmen politik yang kuat diperlukan sebagai penggerak (*driving force*) untuk memungkinkan munculnya politik pangan yang sehat. Keberadaan UU No. 18 Tahun 2012 merupakan bentuk nyata dari dukungan komitmen politik pemerintah/eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut harus diimplementasikan dan dijabarkan dalam bentuk peraturan, kebijakan, program, dan anggaran. Segala kebijakan dan peraturan mulai dari tingkat pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang pada akhirnya berkaitan dengan masalah pangan

Tabel 1.  
Peran Komando Kewilayahan Sebagai Regulator

Regulator/ kebijakan	Peran Komando Kewilayahan	Uraian	Capaian
Ketersediaan pangan	Melakukan pendampingan dan menjalankan regulasi yang ada	Penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri dan pangan cadangan	Tersedianya pangan di Kabupaten Biak Numfor serta swasembada pangan untuk komoditas strategis
Distribusi atau keterjangkauan pangan	Menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga bahan pokok pangan	Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor	Tersedianya pasokan pangan yang terjangkau dan stabil kepada masyarakat
Konsumsi pangan	Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan yang beragam dan aman	Pengembangan produk pangan lokal	Terjadinya peningkatan penanganan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Biak Numfor

Sumber: Data Staf Teritorial Kodim 1708/BN

harus sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Jadi sebagai bahan rekomendasi dari peneliti bahwa kedepannya dalam menguji ketahanan pangan dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat alangkah baiknya jika pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor mengkaji kembali ketahanan pangan dengan membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan kepada petani di Kabupaten Biak Numfor.

Matrik dalam Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor maka sebuah regulasi harus jelas dan terarah untuk menjaga kestabilan pangan yang ada, meskipun dalam penjelasan di atas masih mengacu pada regulasi kementerian pertanian maka hal tersebut juga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor untuk menerapkan kebijakan tersebut, di samping itu peran Komando Kewilayahan sebagai regulator dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam peningkatan ketahanan pangan dengan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.

Jika lihat di era pandemi ini peran TNI sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor agar masyarakat mampu menjaga tingkat kelaparan yang akan terjadi, olehnya itu dibutuhkan regulator yang memang mampu menjadi jembatan dalam menyelesaikan setiap permasalahan masalah pangan yang ada.

### **Peran Komando Kewilayahan Sebagai Dinamisator dalam Membantu Pemerintah Daerah**

Jika melihat fungsi dinamisator sebagai Komando Kewilayahan atau secara umum sebagai prajurit adalah kemampuan TNI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat, dan untuk memahami serta merasakan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan TNI untuk secara nyata membimbing, menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi dalam pembangunan. disamping itu, peran Komando Kewilayahan sebagai dinamisator sangat penting dalam pengembangan pertanian dalam mencapai target dan hasil yang akan dicapai berdasarkan tugas dan fungsi yang akan dilakukan.

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa peran Komando Kewilayahan sebagai dinamisor dilihat dari proses komunikasi sudah terlihat baik, hal ini terlihat bahwa komunikasi yang dibangun sama petani tersampaikan sesuai dengan penjelasan yang ada sehingga mobilitas dalam meningkatkan ketahanan pangan sangat baik dilakukan oleh petani, dilihat dari bimbingan dan pengarahan terlihat dari hasil yang dicapai belum optimal, hal ini disebabkan partisipasi masyarakat petani di Kampung Suneri dan Moibaken belum tertata secara baik dalam mengelola lahan pertanian hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petani dalam meningkatkan sumber daya manusianya, dilihat dari sosialisasi yang dilakukan belum terkoordinasi secara baik antara Komando Kewilayahan dengan dinas pertanian karena disebabkan akses jalan atau prasarana yang kurang memadai untuk menyampaikan sosialisasi di lapangan.

Gambaran secara umumnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Komando Kewilayahan sesuai dengan fungsi sebagai dinamisor belum terlihat secara signifikan karena masih adanya kendala yang

terjadi di masyarakat bagaimana dinamika yang terjadi, kurang terjadinya hubungan komunikasi dengan baik dalam melakukan pendampingan dalam peningkatan ketahanan pangan di Kampung Moibaken dan Kampung Suneri. Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam melakukan aktivitas yang telah dikerahkan oleh Komando Kewilayahan, tidak terjadinya pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya dalam meningkatkan ketahanan pangan, di samping itu akses sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dalam pengelolaan lahan oleh petani kurang maksimal dan efektif.

Olehnya itu tugas TNI sebagai dinamisor harus mampu menjembatani pemerintah dalam hal ini dinas pertanian dengan petani baik itu secara kelompok maupun individu. Komando Kewilayahan dalam hal ini Babinsa yang berperan aktif di lapangan harus mampu melakukan pendampingan dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam kelompok tani maupun dengan penyuluh, proses mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.

Tabel 2  
Peran Komando Kewilayahan Sebagai Dinamisor

Peran Komando Kewilayahan sebagai Dinamisor	Uraian	Target Yang Di Capai	Hasil Yang Di Capai
Komunikasi	Pendampingan kepada petani dalam pemerikan pengetahuan tentang pentingnya dalam mengembangkan produksi pertanian	Partisipasi petani di Kampung Moibaken dan Kampung Suneri Meningkat	Tercapainya target produksi pangan dan meningkatnya pendapatan petani
Bimbingan dan Pengarahan	Pendampingan yang dilakukan dengan mengarahkan petani untuk melaksanakan program pemerintah pendampingan dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan program pertanian	Terbentuknya kerjasama yang baik antara TNI, penyuluh dan Kelompok Tani	Tercapainya hasil dari program yang ditetapkan oleh pemerintah kepada petani
Sosialisasi		Terarahnya dan terbangun komunikasi yang intens kepada petani dalam mengembangkan pertanian	Tercapainya kerjasama yang baik antara TNI dan penyuluh pertanian serta kelompok tani dalam melakukan program ketahanan pangan

Sumber: Data Staf Teritorial Kodim 1708/BN

### **Peran Komando Kewilayahan Sebagai Fasilitator dalam Membantu Pemerintah Daerah**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka peran Komando Kewilayahan dari aspek fasilitator sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor dengan mencoba mengkaji sejauh mana pencapaian yang dilakukan bersama dengan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Biak Numfor dan juga dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani yang ada dengan melalui metode yang dilakukan sebagai fasilitator. Oleh sebab itu dapat dilihat sebagai berikut pentingnya aspek fasilitator dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa tugas Komando Kewilayahan sebagai fasilitator dilihat dari pelatihan dengan target pencapaiannya yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota TNI yang diberikan tugas dilapangan, hal tersebut terlihat belum signifikan dalam pelaksanaan pelatihan dilakukan karena masih terdapat petani yang belum memahami teknik pengelolaan lahan.

Dilihat dari pengembangan dan produktivitas dari hulu ke hilir belum optimal, hal ini disebabkan keterlibatan pemerintah daerah tidak secara mutlak dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Dilihat dari penguatan kelembagaan terutama kelompok tani yang ada kurang optimal, hal ini disebabkan karena peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian tidak maksimal dalam melakukan pendampingan dan pembentukan kelompok tani di Kampung Suneri dan Moibaken, hal ini terjadi karena sarana dan prasarana yang kurang memadai dan efektifitas SDM yang kurang memadai sehingga proses pendampingan di lapangan dalam mencapai target ketahanan pangan belum baik dan maksimal.

Oleh sebab itu di Kabupaten Biak Numfor potensi ketahanan pangan masih sangat rentan karena dipengaruhi oleh kondisi lapangan dan tanah sehingga proses pengelolaan lahan pertanian belum memadai, sehingga hal tersebut diperlukan kerjasama TNI dalam membangun serta memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat Biak berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai

Tabel 3.  
Aspek Penting Komando Kewilayahan Sebagai Fasilitator

<b>Aspek Penting Sebagai Fasilitator</b>	<b>Uraian</b>	<b>Capaian</b>
1 Pelatihan	Upaya peningkatan kualitas dalam bekerja dan meningkatkan kemampuan SDM petani serta produktivitas pertanian	Tercapainya pengetahuan petani pentingnya ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor
2 Pengembangan dan peningkatan produktivitas dari hulu ke hilir	Mendampingi petani, menyediakan alat dan menyiapkan bibit, perawatan tanaman dan pemasaran hasil panen	Tercapainya produksi pertanian dan kesejahteraan petani dalam mengembangkan pertanian
3 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Memperbaiki akses sarana dan prasarana untuk mempermudah petani memasarkan hasil produksi panen	Tersedianya akses jalan yang baik untuk melakukan pemasaran hasil produksi pertanian dari petani
4 Penguatan kapasitas kelembagaan	Mendampingi dan membantu penyuluh pertanian dengan kelompok tani dalam peningkatan kelembagaan pertanian	Terbentuk suatu kelompok tani yang efektif dalam mengelola pertanian dan meningkatkan sumber daya petani
5 Pendampingan pada petani tingkat pemerintah daerah	Mendampingi dan menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah daerah	Adanya akses informasi yang disampaikan kepada petani atas pendampingan mengenai aspirasi.

Sumber: Data Staf Teritorial Kodim 1708/BN

seorang prajurit sebagai fasilitator. Di samping itu kerjasama dengan pemerintah harus sinergi sehingga dapat menciptakan koordinasi yang efektif.

### **Strategi Komando Kewilayahan dalam membantu Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan**

Jika ditelaah lebih mendalam lagi dari arah kebijakan badan ketahanan pangan tersebut di atas, maka dapat kembali dikaji bahwa hal tersebut tidak berlaku secara universal di setiap daerah provinsi maupun kabupaten yang ada karena kondisi wilayah serta tanah yang tidak memungkinkan untuk variasi dari tanaman yang ada berbeda setiap daerah atau desa sehingga hasil pertanian yang didapatkan juga berbeda untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini dapat tergambarkan di Kampung Suneri dan Moibaken Kabupaten Biak Numfor komoditi yang paling menonjol adalah sayuran sehingga hal tersebut dianalisis bahwa peningkatan pendapatan masyarakat masih belum mencapai dalam meningkatkan pendapatannya, di samping itu akses jalan dan kendaraan yang kurang maksimal. Olehnya itu perlu dilakukan pendekatan dengan strategi yang matang dalam mengembangkan ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor oleh Komando Kewilayahan agar dapat mencapai swasembada pangan, adapun strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

**Pertama, Strategi Sosialisasi.** Melaksanakan sosialisasi kegiatan peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan secara bersama antara Pemda, Dinas Pertanian, Instansi terkait agar petani memahami arti penting peningkatan hasil dan penganekaragaman produksi pangan. Dalam konteks penelitian ini sosialisasi yang dimaksudkan adalah bagaimana Komando

Kewilayahan dengan melakukan proses interaksi kepada masyarakat atau petani dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan tupoksinya sebagai sistem keamanan negara yakni sebagai abdi negara dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pangan, Namun dalam hal pelaksanaannya belum tercapai dengan baik karena masih banyak petani yang belum menerima informasi bahkan program-program yang ada, di samping itu kesadaran masyarakat petani atau kelompok tani yang ada tidak terlihat begitu responsif sehingga partisipasi mereka kurang menonjol dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Hal tersebut juga di atas terjadi karena kurangnya sumber daya manusia dari TNI itu sendiri sehingga untuk menjangkau daerah yang ada tidak terjadi dengan baik sehingga proses sosialisasi program yang akan disampaikan tidak efektif.

Pernyataan di atas terlihat bahwa petani atau kelompok tani yang ada masih sangat mengharapkan kepada Komando Kewilayahan dan penyuluh pertanian untuk membangun interaksi melalui sosialisasi kepada mereka, terutama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petani, hal tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh Komando Kewilayahan bersama dengan Penyuluh pertanian memang jarang terjadi sehingga pengetahuan masyarakat akan sesuatu program dinas pertanian tidak tersampaikan dengan baik dan optimal.

**Kedua, Strategi Pengendalian dan Pengawasan.** Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif (tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi, tepat guna dan tepat jumlah). Dalam penelitian

Gambar 2.  
Kegiatan Sosialisasi Komando Kewilayahan



*Dokumentasi : Sosialisasi Ketahanan pangan oleh Dandim 1708/BN*

ini dibahas mengenai aspek pengawasan dan pengendalian, serta kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian namun yang menjadi fokus adalah Komando Kewilayahan (Kodim 1708/BN) Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pelaksanaan peran Komando Kewilayahan dalam membantu pemerintah daerah dan implikasinya terhadap ketahanan pangan.

Di Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan dapat diamati bahwa ketahanan pangan masih rentan untuk dikendalikan sehingga perlu pengawasan yang lebih efektif dengan dukungan TNI dalam hal ini Komando Kewilayahan yang dimana lakonnya adalah Babinsa membantu pemerintah dalam hal ini dinas pertanian dalam mencapai swasembada pangan di Kabupaten Biak Numfor terkhusus dengan fokus penelitian di Kampung Moibaken dan Kampung Suneri, hal tersebut peneliti melihat bahwa pengendalian dan pengawasan terkait dengan ketahanan pangan belum berjalan dengan optimal, hal ini didukung karena keterbatasan anggaran dan akses jalan yang kurang memadai, sehingga peran Komando Kewilayahan dalam melakukan pengawasan terhadap Dinas Pertanian di

lapangan kurang efektif. Di samping itu proses pembinaan terhadap petani atau kelompok tani yang sudah terbentuk tidak maksimal hal ini terjadi karena pengawasan yang dilakukan tidak terjadi secara komprehensif. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dengan memperbaiki fasilitas akses jalan yang ada sehingga memudahkan Komando Kewilayahan dalam melakukan tugasnya bersama dengan dinas pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Komando Kewilayahan cukup baik, namun sebatas pada pengendalian keamanan masyarakat. Jika melihat pada ketahanan pangan belum terlihat secara jelas pengawasan dan pengendaliannya, di samping itu Dinas Pertanian harus lebih agresif dan fokus lagi melakukan pengendalian dan pengawasan kepada petani agar dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Di samping itu kesadaran petani perlu lebih dikendalikan lagi terhadap pentingnya menjadi seorang petani dalam memakmurkan kampung terkhusus pemerintah daerah.

Menurut Siagian (2003:258), pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter di dalam buku (Solihin, 2009:193), pengendalian dan pengawasan atau (*controlling*) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

**Ketiga, Strategi Edukasi.** Kerja sama pelatihan secara terpadu dengan Dinas/ Instansi terkait kepada kelompok petani, TNI AD membantu Pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan dapat terlaksana dengan baik. Pokok masalah yang saat ini terjadi di Kabupaten Biak Numfor terutama pada kampung-kampung atau distrik yang ada adalah kurangnya edukasi yang terlihat, sehingga pemahaman masyarakat atau petani dengan metode pengelolaan tanah yang lebih efektif dan efisien serta bahan pangan

yang cocok untuk ditanam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut implementasi peran Komando Kewilayahan bersama dengan pemerintah dalam hal ini dinas pertanian harus mampu membuat terobosan baru untuk dilakukan kepada petani yang ada di Kabupaten Biak Numfor, kemudian diperlukan perannya yang lebih agresif dan tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi di era pandemi ini di samping itu perlu dilakukan edukasi atau pendekatan-pendekatan kepada petani dan diberikan program edukasi yang dapat menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian mereka.

Jika melihat kondisi di lapangan petani sangat mengharapkan peran yang lebih besar dilakukan oleh dinas pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian dengan memberikan sebuah edukasi yang dapat memberikan hasil lebih kepada petani, bukan fokus pada program-program yang telah dilakukan seperti sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang dibangun oleh dinas pertanian masih sebatas pada pendampingan dengan pendekatan langsung ke masyarakat dalam membuka lahan sampai panen, artinya

Gambar 3  
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Komando Kewilayahan



Dokumentasi : Pengendalian dan Pengawasan bersama Babinsa pasca Panen dan Penanaman Lahan Pertanian

Gambar 4  
Kegiatan Edukasi Komando Kewilayahan



Dokumentasi : Edukasi Praktek cara penanaman tanaman oleh Kodim 1708/BN Biak Numfor

apa bahwa edukasi yang dilakukan belum berjalan dengan optimal hal ini disebabkan karena tidak adanya pembekalan serta latihan-latihan yang diberikan kepada petani dalam mengelola lahan dengan tepat dan efektif, di samping itu keterbatasan fasilitas pertanian yang tidak memungkinkan sehingga hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan tanah yang ada.

Pelaksanaan edukasi dilakukan secara rutin kepada petani agar dapat terjadi komunikasi yang searah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya untuk mengelola bahan pertanian menjadi lebih praktis lagi sehingga hasil lebih baik kedepannya.

**Keempat, Strategi Koordinasi.** Tugas Komando Kewilayahaan, melaksanakan koordinasi dengan Pemda, Dinas pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan setempat sesuai dengan MoU/nota kesepahaman, KKS ( kesepakatan kerja sama) antara TNI dan kementerian pertanian RI serta melaksanakan kerja sama dengan kelompok tani dan Instansi terkait/swasta guna mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan di daerah.

Jika melihat peran Babinsa dalam membangun koordinasi sangatlah penting dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor olehnya itu, Bintara Pembina Desa TNI AD yang dikenal Babinsa yang merupakan garda terdepan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Babinsa berada di bawah Koramil sebagai organisasi struktural yang memiliki wilayah tugas di Desa atau kelurahan sebagai pembina. Seorang Bintara Pembina Desa memiliki wilayah tanggung jawab bervariasi, dari satu desa hingga beberapa desa. Tiap Kodim pasti punya Koramil model tempat para Babinsa itu ditempa. Intinya, bagaimana mengubah mereka dari personel satuan tempur menjadi personel satuan teritorial yang siap pakai sebagai pembina di desa.

Kodim 1708/BN menjalin koordinasi yang intensif dengan semua pihak guna mewujudkan sinkronisasi, keserasian dan keseimbangan dalam peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung program

Gambar 5  
Kegiatan Edukasi Komando Kewilayahan



Dokumentasi : Koordinasi Kepada Petani Bersama Babinsa dan Penyuluh Pertanian

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif (lahan tidur) yang dimiliki untuk dikelola menjadi lahan pertanian melalui kerjasama dengan kelompok tani dan pihak ketiga lainnya yang dapat mencegah krisis pangan tersebut serta keikutsertaan para babinsa untuk terus bersama-sama dengan rakyat mengatasi permasalahan yang ada di wilayah masing-masing termasuk bidang pertanian; dan Guna mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketahanan pangan TA 2020 oleh Kodim 1708/BN diperlukan adanya rencana sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di lapangan untuk mencapai hasil yang optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komando Kewilayahan dengan strategi koordinasi yang dibangun bersifat normatif, karena koordinasi yang dilakukan bersama dengan dinas pertanian belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini disebabkan karena akses informasi yang

ada tidak terjadi serta pendampingan yang dilakukan kepada petani belum terlihat secara koheren dan baik. Olehnya itu keterlibatan Komando Kewilayahan Kabupaten Biak Numfor dalam bidang ketahanan pangan sangat penting, karena mereka mempunyai kewajiban melaporkan data teritorial yang ada di desa binaannya serta menjaga tetap dalam kondisi yang baik. Sejalan dengan pendapat (Handoko, 2016:194), koordinasi adalah kegiatan kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi-informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik.

### **Keterkaitan Peran Komando Kewilayahan Terhadap AstaGatra dalam peningkatan Ketahanan Pangan**

Dalam aspek kehidupan manusia sebagai gejala (fenomena) sosial dapat kita pahami dari interaksi dengan lingkungannya Manusia dengan segala potensi yang dimilikinya (akal, perasaan keterampilan berkomunikasi) untuk kelangsungan hidupnya mendapat tantangan dan berinteraksi dengan lingkungannya, menghasilkan kebudayaan, Dengan kata lain, manusia dengan potensi yang dimilikinya itu memungkinkan manusia menjadi manusia budaya. Merupakan pemetaan atau pengelompokan aspek kehidupan yang sangat luas dan sebenarnya terkait satu sama lain. Karena luas dan kompleksnya aspek kehidupan itu maka untuk memudahkan kita dalam pengkajian dibuat model dari aspek kehidupan tersebut. Model adalah penyederhanaan dari keadaan yang sebenarnya

tanpa menghilangkan ciri-ciri asli hasil dari pemetaan.

Ketahanan pangan dalam sistem “Astragatra” mencakup seluruh upaya kita dalam memanfaatkan dan memelihara, mengembangkan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan yang ada dalam delapan gatra untuk diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Oleh karena itu dalam penelitian ini dapat dikaji faktor-faktor dominan dalam ketahanan pangan dan implementasinya dalam mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor.

#### **a. Geografi**

Kondisi geografi suatu negara atau wilayah berpengaruh terhadap bangsa atas wilayah yang menempatnya. Pengaruhnya berupa pola kehidupan, sikap hidup, dan cara berpikir terhadap dirinya sebagai penduduk di wilayah tersebut dan melihat wilayah lain di sekitarnya yang melintasinya. Untuk itu dapat digambarkan bahwa Daerah Kodim 1708/BN terdiri dari 3 Pulau besar (Biak, Supiori dan Numfor) dan 28 buah pulau kecil, dengan batas sebelah selatan selat Yapen Waropen, sebelah utara lautan Pasifik, sebelah timur lautan Pasifik dan sebelah barat selat Yapen Waropen. Luas keseluruhan Kabupaten Biak Numfor 3.130 Km persegi dimana 45 % terdiri dari hutan belukar dan hampir seluruh daratan terdiri dari karang, jalan-jalan perhubungan ditempuh lewat darat, laut dan Udara.

Geografi suatu negara adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi, yang memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah kedalam maupun keluar. Bentuk kedalam menampakkan corak, wujud, isi dan tata susunan wilayah negara. Geografi sebagai kesatuan wilayah negara merupakan wadah dan ruang hidup bangsa. Bentuk keluar

menampakkan situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Baik bentuk kedalam maupun keluar geografi merupakan wadah dan ruang hidup bagi bangsa yang mendiaminya, serta menentukan wujud, isi dan kehidupan, yang dapat mempengaruhi lingkungannya.

#### **b. Keadaan dan Kekayaan Alam**

Ketahanan pangan belum mencapai target yang ada, karena produksi pertanian masih kecil untuk dilakukan pengelolaannya hal ini disebabkan kurangnya partisipasi petani akan kesadaran pentingnya ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor, disamping itu kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah dalam hal sarana dan prasarana belum memadai secara teknologi sehingga menjadi hambatan dalam mencapai target swasembada pangan. Disamping itu, Kabupaten Biak Numfor dikelilingi Variasi musim ini membentuk pola kehidupan masyarakat yang tinggal di kepulauan menjadi bervariasi dalam mengembangkan dan mengelola hal yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

#### **c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk**

Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Tinjauan masalah kependudukan umumnya, dikaitkan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan dan keamanan, antara lain, jumlah, komposisi, persebaran dan kualitas penduduk, serta faktor yang mempengaruhi dan perkembangannya.

Gatra ini mencakup jumlah penduduk, struktur penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan, sebaran dan kualitasnya. Jumlah penduduk Indonesia nomor empat terbesar di dunia. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar saja, tanpa didukung oleh kualitas, struktur penduduk yang diperlukan

dalam pembangunan, pertumbuhan yang tidak terkendali, sebaran yang merata dapat menimbulkan masalah. Struktur penduduk yang diharapkan adalah yang dapat mendukung pembangunan, yaitu penduduk yang berproduktivitas tinggi. Untuk berproduktivitas tinggi maka perlu penguasaan teknologi. Untuk penguasaan teknologi ini diperlukan investasi yang besar dalam bidang pendidikan dalam arti luas, sedangkan investasi baru dapat dilakukan apabila ada peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat meningkat kalau ada kenaikan nyata dalam pendapatan per kapita yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas oleh sumber daya manusia yang berketerampilan dan berpengetahuan sebagai hasil pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan masalah yaitu makin meningkatnya beban ketergantungan atau angka ketergantungan (*dependensi ratio*) dan penyediaan sarana untuk keperluan anak-anak (aspek pendidikan dan kesehatan) dan pada akhirnya nanti akan menambah jumlah angkatan kerja. Apabila kelak ini tidak dapat diserap oleh lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran yang dapat menjadi faktor destabilisasi dalam pembangunan nasional.

#### **d. Ideologi**

Ideologi berangkat dari falsafah, yaitu renungan pendirian yang didorong oleh keinginan untuk mencari hikmah kebenaran, kearifan, kebijaksanaan, dalam hidup. Apabila renungan pemikiran ini sudah sampai pada pandangan dan pendirian tertentu maka kita sebut sebagai pandangan hidup, yaitu keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tentang hakikat nilai kehidupan, sistem nilai sikap kepribadian, dan tradisi. Semuanya itu disimpulkan dan disusun secara

sistematis maka disebut sebagai ideologi atau saham, yaitu pandangan nilai yang diyakini kebenarannya yang digunakan sebagai dasar menata masyarakat dan negara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bagaimana kita memantapkan penghayatan dan pengamalan sebagai ideologi bangsa dalam praktik kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tolok ukur yang utama di sini sebagai contoh bagaimana kita meningkatkan penghayatan agama dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab secara rukun dan saling menghormati antara agama dan kepercayaan.

Jika digambarkan secara umum ideologi di Kabupaten Biak Penghayatan Pancasila sebagai dasar negara belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Masalah yang dapat merongrong Pancasila ialah masih ada golongan ekstrim kiri, kanan dan ekstrim lainnya serta sebagian kecil masyarakat yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Mereka mempengaruhi masyarakat dengan janji-janji atau dengan teror/intimidasi agar tidak mau menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Peran Komando Kewilayahan sangat penting disini bagaimana mereka membina dan menjaga daerah teritorial serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pancasila sebagai dasar ideologi kita.

#### **e. Politik**

Secara umum kondisi politik di Kabupaten Biak Numfor dilihat dari Kehidupan dan kesadaran berpolitik sebagian besar masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, terutama didaerah pelosok, demikian juga dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara masih sangat rendah, terbatasnya

kontak sosial dengan masyarakat diluar kelompoknya, Roda pemerintahan terutama ditingkat desa dan kecamatan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan faktor geografi dan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Program pembangunan belum merata karena kesulitan dalam menembus isolasi daerah. Dalam menyambut otonomi daerah masih diwarnai aksi-aksi penolakan otonomi daerah, hal tersebut berpengaruh terhadap kesiapan daerah yang belum maksimal.

#### **f. Ekonomi**

Dalam gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Inilah fondasi perekonomian nasional yang harus kita bangun. Bangun perekonomian ini tergantung pada banyak hal, di antaranya kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan lapangan kerja, modal, IPTEK, manajemen, pertanian, perindustrian dan jasa, prasarana dan sarana, perdagangan dan moneter, serta neraca pembayaran

Di Kabupaten Biak Numfor jika ditelusuri berdasarkan hasil observasi dilapangan tingkat perekonomian dilihat dari Tingkat pendapatan penduduk masih rendah, hasil pertanian dan nelayan yang ada masih terbatas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sembako masih didatangkan dari luar daerah dan harganya masih sulit dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu struktur perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dilihat dari sudut penyerapan lapangan kerja yang didominasi oleh sektor pertanian. Pembangunan nasional yang kita lakukan mengarah kepada industri yang dilandasi oleh pertanian (*agroindustri*) tanpa

mengesampingkan industri kecil (*home industry*) dan industri yang berteknologi tinggi (*high-tech*), mulai dari industri hulu sampai industri hilirnya. Mengandalkan sektor pertanian saja tanpa didukung oleh sektor industri dan jasa, dewasa ini tidak realistis karena sektor ini sangat “rentan” terhadap perubahan iklim dan gejolak harga pasar.

#### **g. Sosial Budaya**

Di Kabupaten Biak Numfor jika dilihat dari Adat istiadat masih kuat melingkupi dalam kehidupan sehari-hari, dan pengaruh tokoh adat melalui dewan adat terhadap masyarakat cukup besar bahkan melebihi pengaruh aparat pemerintah. SDM masyarakat Kabupaten Biak Numfor pada umumnya masih rendah, walaupun sebagian kecil telah ada yang menduduki jabatan di Pemda dan pemerintah pusat. Kondisi kesehatan terutama di daerah pedalaman masih sangat rendah. Oleh sebab itu masalah yang dihadapi di kabupaten biak adalah pendidikan, padahal dalam bidang pendidikan ini adalah peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dan efisiensi pendidikan. Kualitas pendidikan tidak hanya ditunjukkan oleh bertambahnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan tetapi juga aspek efektifnya, yaitu berupa sikap berbudi pekerti luhur, kecintaan kepada tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia (kebanggaan nasional), selektif terhadap budaya asing, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Menurut perhitungan para ahli dalam kondisi sekarang ini, kita hanya menikmati hanya 2,5% hasil kekayaan alam kita, selebihnya 97,5% dinikmati oleh negara-negara maju yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Kita harus menjadi tuan di negeri

sendiri, dan untuk itu dalam sektor pendidikan harus dipacu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Kalau tidak, ketahanan gatra sosial budaya dari sektor pendidikan ini sangat lemah.

Kerja keras pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor sangat diperlukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah tersebut bahwa pendidikan sangatlah penting dalam mengenal berbagai sosial budaya yang ada di Kabupaten Biak Numfor, disamping itu penanaman budaya kepada masyarakat sangatlah penting disampaikan secara dini agar masyarakat dapat paham akan budaya yang dimilikinya sehingga mereka dapat tersadar bahwa sosial budaya sangat penting bagi kehidupan bernegara.

#### **h. Pertahanan-Keamanan (Hankam)**

Pertahanan keamanan merupakan bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan kondisi kelangsungan hidup, perkembangan kehidupan bangsa, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Pertahanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi, dan kekuatan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti.

Secara keseluruhan berdasarkan luas wilayah yang ada di Papua dan secara khusus di Kabupaten Biak Numfor bahwa pertahanan keamanan belum terlihat secara jelas tentang pengendaliannya, hal tersebut karena masih terjadinya konflik antara masyarakat terkait dengan suku dan adat yang ada. disamping itu adanya sebuah organisasi yang melawan pemerintah dengan melakukan perlawanan

bahkan menyerang warga sehingga menimbulkan korban jiwa, hal tersebut terjadi karena kestabilan dan pengendalian ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat papua belum sepenuhnya terjamin.

Peran Komando Kewilayahan sangatlah penting dalam menjaga keamanan negara maupun wilayah tempat mereka melakukan tugas dengan membekali pengetahuan dalam mengelola dan meredam konflik yang akan terjadi, disamping itu perlu peningkatan kualitas sumber daya agar hal yang akan terjadi ke depannya dapat di prediksi dan di selesaikan dengan cepat dibantu peran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor sangatlah penting dalam memberikan motivasi kepada Komando Kewilayahan dalam menjaga keamanan wilayah dengan memberikan perlengkapan sumber daya yang dibutuhkan agar keamanan dan kenyamanan dapat tercipta sehingga program-program yang telah direncanakan terutama dalam bidang ketahanan pangan dapat tercapai dengan baik sehingga pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat papua dapat meningkat.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik dua simpulan sebagai berikut :

*Pertama*, peran Komando Kewilayahan dalam membantu Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena peran yang dilakukan sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator belum terlihat secara signifikan dalam bidang pendampingan terhadap petani dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Keterlibatan Komando Kewilayahan di Kabupaten Biak Numfor sebagai fasilitator secara langsung

dalam ketahanan pangan masih perlu dikaji ulang terkait mekanisme dalam melakukan pendampingan kepada petani. Kemudian dari dinamisator dalam perannya perlu dioptimalkan dengan upaya mengarahkan seluruh satuan yang ada atau membentuk posko tentang ketahanan pangan yang tidak hanya sekedar menjadi pengarah seperti yang berlaku selama ini, sehingga dengan pengalaman dan kebersamaan prajuritnya dapat melakukan langkah dan tindakan yang cepat guna mencapai swasembada pangan.

*Kedua*, dilihat dari strategi peran Komando Kewilayahan di Kabupaten Biak Numfor perlu dioptimalkan. Hal tersebut terjadi dilihat dari proses sosialisasi yang dilakukan kepada petani terkait dengan program ketahanan pangan kurang efektif hal tersebut disebabkan karena sinkronisasi program yang dilakukan dengan Dinas Pertanian kadang berbeda, dimana proses sosialisasi ketahanan pangan kepada petani jarang terjadi dilapangan. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Komando Kewilayahan terlihat cukup baik dari segi keamanan, namun dalam ketahanan pangan terlihat bahwa perlu dilakukan peningkatan pengawasan Dinas Pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian dalam memberikan bantuan kepada petani serta mengendalikan kelompok tani yang ada untuk melakukan program yang telah direncanakan untuk mencapai swasembada pangan, dalam hal edukasi perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan serta model edukasi yang terbaharui agar petani mendapatkan pengetahuan baru dalam bertani, dan koordinasi terlihat kurang baik hal tersebut terlihat kerjasama yang dibangun antara Komando Kewilayahan dan dinas pertanian tidak signifikan sehingga proses pelaksanaan program tidak efektif dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Ginanjar Herdiansah, dkk (2017). *Peran Dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Pembantuan Pemerintah Daerah: Studi Di Kabupaten Lebak*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Departemen ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia
- Baliwati, Y.F, D. (2004). *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021
- FSVA Dewan Ketahanan Pangan, D. P. (2009). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia A Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia*. Jakarta
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, M. ., Huberman A.M, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Musanef. (2005). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Masagung.
- Nasution. (2015). *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Oxfam. (2001). *The Impactt of Rice Trade*. Indonesia: Liberalization on Food Resilience In.
- Pamudji. (1995). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian*

- Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 1–27.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Daya Widya.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Suradinata, T. . (1998). *Struktur Tumbuhan*. Bandung: Angkasa Anggota IKAPI.
- Suryaningrat, B. (1998). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafiie, I. K. (2012). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco.
- Peraturan Pemerintah RI No, 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan
- UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 8d
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 disebutkan Tentara Nasional Indonesia (TNI)